

**ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI BPPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Oleh:

Wira Malensang

NIM. 21 043 094



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI
BPPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Pada Program Studi Akuntansi Keuangan**

Oleh:

WIRA MALENSANG

NIM : 21043094



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS IMPLEMENTASI SIMPATDA DALAM
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI BPPRD KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

Oleh

Nama : Wira Malensang

NIM : 21043094

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk
Diujikan

Manado, 7 Juli 2021

Pembimbing 1



Nama Wenny A. Ginting, SE.,MSi
NIP. 19870827 202203 2005

Pembimbing 2



Nama Meike Kesek, SH.,MAP
NIP.19770522 200312 2001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI BPPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Hari Senin, 28 juli 2025, pukul 11:00 – di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Wira Malensang

NIM, 21 043 094

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Dr. Ivonne H. Putong, SE.Ak., M.Ak
NIP. 197206152002122003
Penguji I : Jolly L. R. Turangan, SH., M. Hum
NIP. 196807121994031001
Penguji II : Dr. Dra. Rolina E. Manggopa, M.Pd
NIP. 196208011988032003

Mengetahui

JURUSAN AKUNTANSI
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CSRS
NIP. 197002051998022002



Sekretaris Jurusan

Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA
NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 30 juli 2025

Penulis



Wira Malensang

NIM 21 043 094

ABSTRAK

Malensang, Wira. 2025. **Analisis Sistem Penerimaan Pajak Daerah di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Wenny A. Ginting, SE., MSi dan Pembimbing II: Meike Kesek, SH.,MAP

Penelitian ini membahas mengenai sistem penerimaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. BPPRD adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas mengelola pajak serta retribusi daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud yang berlokasi di Jl. Bui Batu, Kompleks Perkantoran Melonguane, Talaud. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan pajak daerah belum berjalan dengan optimal beberapa hambatan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur jaringan dan listrik yang belum memadai, dan lokasi server yang berada di luar kantor BPPRD. hal ini berdampak pada kinerja penerimaan pajak, yang di tunjukan dengan banyaknya jenis jenis pajak yang tidak mencapai target penetapan dari tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan analisis kerangka pengendalian internal mulyadi, ditemukan bahwa sebagian besar komponen pengendalian seperti struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur, praktik yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sebagai rekomendasi, peneliti merekomendasi kepada BPPRD untuk melakukan penguatan SDM, pengembangan infrastruktur, evaluasi sistem informasi, serta perbaikan manajemen resiko sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Sistem Penerimaan, Pengendalian Internal

ABSTRACT

Malensang, Wira. 2025. *Analysis of the Implementation of SMPATDA in Regional Tax Management at the Regional Revenue Management Agency (BPPRD) of the Talaud Islands Regency*. Thesis, Applied Bachelor of Financial Accounting Study Program, Accounting Department, Manado State Polytechnic. Supervised by Advisor I: Wenny A. Ginting, SE., M.Si and Advisor II: Meike Kesek, SH., MAP.

This study discusses the revenue collection system at the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Talaud Islands Regency. BPPRD is a regional government agency responsible for managing local taxes and retributions. The objective of this research is to analyze the regional tax revenue collection system.

The study was conducted at the BPPRD of Talaud Islands Regency, located on Jl. Bui Batu, Melonguane Government Office Complex, Talaud. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The data used consists of both primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation techniques.

The results of the study show that the regional tax revenue system has not been running optimally. Several obstacles were identified, including limited human resources, inadequate network and electricity infrastructure, and the server's location being outside the BPPRD office. These issues have affected tax collection performance, as indicated by the large number of tax types that failed to meet the target from 2021 to 2024. Based on the analysis using Mulyadi's internal control framework, it was found that most control components—such as organizational structure, systems of authority and procedures, sound practices, and employees whose qualifications match their responsibilities—have not been effectively implemented.

As a recommendation, the researcher suggests that BPPRD strengthen human resources, develop infrastructure, evaluate the information system, and improve risk management as strategic measures to enhance the effectiveness of regional tax revenue collection.

Keywords: Revenue Collection System, Internal Control

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Wira Malensang
Tempat/Tanggal Lahir : Manado/19 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Talaud
Email : wiramalensang1910@Gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 4 Melonguane
SMP : SMP Negeri 4 Melonguane
SMA : SMA Negeri 1 Melonguane
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

NAMA ORANG TUA

Ayah : Dikson Malensang
Ibu : Nely Amiman

MOTTO

Because God Said, “Never Will I Leave You; Never Will I Forsake You”

Hebrews 13:15

Karena Allah Telah Berfirman, “Aku Sekali – Kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali – Kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau.”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Implementasi Simpatda Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Ivoletti M. Walukow, SE. Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Jerry Sonny Lintong, SE., MAP, CRA., CRP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Labaratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.

16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Wenny A. Ginting, SE.,MSi Selaku Dosen Pembimbing 1
18. Meike Kesek, SH.,MAP Selaku Dosen Pembimbing 2
19. Dosen Penguji 1
20. Dosen Penguji 2
21. Dosen Penguji 3
22. Lusye C. Kumaat, SE.,AK.,MSA Selaku Dosen Wali
23. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado
24. Kepada Kedua Orang Tuaku Tersayang. Bapak Dikson Malensang dan Ibu Nely Amiman Trimakasih Atas Semua Kasih Sayang Dan Dukungan Salama Ini, Trimakasih Atas Pengorbana Yang Sudah Mama Dan Papa Berika Walaupun Belum Bisa Terbalaskan, Dan Trimakasih Atas Doa Yang Dilangitkan Agar Saya Bisa Sampai Di Titik ini.
25. Kepada Istriku Tercinta Sofia Indah Tampongagoy Trimakasih Atas Cinta Kasih Dan Ketulusan Yang Sudah Kau Berikan, Trimakasih Telah Mendukung Dan Memberikan Semangat Membuat Hari – Hariku Penuh Dengan warna.
26. Kepada Anakku Tercinta Keifano Goliel Malensang Trimakasih Sudah Hadir Dalam Hidupku
27. Kepada Bapak Andris Erdy Tampongangoy dan Ibu Nova Wenda Mamahit Trimakasih Atas Doa, Dukungan, dan Kasih Sayang Yang Bapak Ibu Berikan Salam Ini.
28. Kepada Kakaku Tercinta Putra Malensang dan Elisabeth Ambalau, Olivia Malensang dan Riky Awaeh, Trimakasih Atas Doa, Dukungan dan Motivasi Yang Selalu Kalia Berikan Semua Itu Menjadi Sumber Kekuatan Bagi Saya
29. Kepada Kakaku Terkasih Endro Tampogangoy dan Kelly Liwan, Juan Tampongangoy dan Claudia Rantung, Fandy Tampongangoy dan Cantika Lontaan, Trimakasih Atas Doa dan Suport Yang Kalian Berikan Menjadi Kekuatan Bagi Saya
30. Kepada Adik Riyuni Malensang Trimakasih Atas Bantuannya Selama ini

31. Kepada Ponakan – Ponakanku Tersayang Jazeel Malensang, Vallery, Kaithlyn, Karsten, Rafeilla, Hyden Yang Selalu Menghibur Dan Membuat Saya Tersenyum Setiap Kali Bertemu
32. Kepada Teman Terkasih Emanuel, Rahmat, Jerry, Safna, Adix Tesa, Prima, Filzah, Rono, Yang Selalu Memberikan Dukungan. Kehadiran Kalian Menjadi Kekuatan Bagi Saya.
33. Kepada Tema Sekelas 8D Yang Selalu Bersama Dari Semester 1 Sampai Sekarang Dan Tetap Saling Mendukung
- Semoga Rasa Trimakasih Ini Menjadi Ungkapan Kecil Dari Besarnya Cinta Dan Apresiasi Saya Kepada Kalian Semua. Penulis Menyadari Bahwa Dalam Penyusunan Skripsi Ini Masih Jauh Dari Kemsempurnaan. Oleh Karena Itu Mengharapkan Kritik Yang Membangun Dari Semua Pihak Demi Terciptanya Skripsi Yang Baik. Akhir Kata Penulis, Ucapkan Terimakasih.

Manado, 30 juli 2025

Wira Malensang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
RIWAYAT HIDUP	7
MOTTO	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI	12
DAFTAR TABEL	14
DAFTAR GAMBAR	15
DAFTAR LAMPIRAN	16
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Sistem	5
2.2 Informasi	5
2.3 Akuntansi	6
2.4 Sistem Penerimaan Kas	6
2.5 Sistem Pengendalian Intern	7
2.5.1 Unsur-unsur SPIP	7
2.6 Pajak Daerah	8
2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
2.8 Flowchart	9
2.9 Peneliti Terdahulu	12
2.10 Kerangka Berpikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	16

3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
3.3 Sumber Data	16
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Analisis Data	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	18
4.1.1 Profil Perusahaan	18
4.1.2 Visi Misi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	20
4.1.3 Struktur Organisasi.....	21
4.1.4 Uraian Pekerjaan	21
4.2 Hasil Penelitian	24
4.2.1 Gambaran Umum Sistem Penerimaan di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud	24
4.2.2 Mekanisme Pelayanan dan Prosedur.....	24
4.2.3 Flowchart Penerimaan.....	25
4.2.3 Sistem Informasi Pajak Daerah.....	25
4.2.4 Permasalahan yang Ditemukan	27
4.2.5 Dampak Permasalahan terhadap kinerja sistem penerimaan	28
4.2.5 Tingkat realisasi penerimaan pajak daerah	28
4.4 Hasil Pembahasan	33
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Rekomendasi.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Flowchart</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 2 Peneliti Terdahulu.....</i>	<i>12</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Kerangka Berpikir.....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 2 Profil Perusahaan.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 3 Struktur Organisasi.....</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 4 Flowchart Penerimaan.....</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 5 Penetapan dan Realisasi Pajak Hotel.....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 6 Penetapan dan Realisasi Pajak Restoran</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 7 Penetapan dan Realisasi Pajak Hiburan</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 8 Penetapan dan Realisasi Pajak Reklame.....</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 9 Penetapan dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 10 Penetapan dan Realisasi Pajak MBLB.....</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 11 Penetapan dan Realisasi Pajak PBB- P2</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 12 Penetapan dan Realisasi Pajak BPHTB</i>	<i>32</i>

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Surat pemberitahuan tagihan pajak daerah.....</i>	<i>39</i>
<i>Lampiran 2 Konsultasi Pembimbing 1.....</i>	<i>41</i>
<i>Lampiran 3 Konsultasi Pembimbing 2.....</i>	<i>41</i>
<i>Lampiran 4 Surat Keterangan Plagiasi</i>	<i>49</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi fokus utama bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, terutama di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang menuntut efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk memproses data sehingga menghasilkan informasi laporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan (Endaryati, 2021). Dari definisi tersebut sistem informasi diartikan sebagai suatu cara yang terorganisir mulai dari mengumpulkan, memasukkan, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk mencapai tujuan suatu informasi. Salah satu peran sistem informasi akuntansi yaitu untuk mencatat serta menyimpan data terkait aktivitas suatu organisasi. Dengan adanya Sistem informasi akuntansi yang efektif, pengumpulan data pajak menjadi lebih mudah dan akurat. Disamping itu, penerapan sistem informasi akuntansi turut berperan dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan pajak secara lebih terstruktur. Sistem ini juga mempermudah identifikasi serta pemantauan atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja daerah, pengelolaan pajak daerah menuntut sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, banyak pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Talaud, mulai mengadopsi sistem informasi berbasis teknologi dalam pengelolaan pajak. Penerapan sistem informasi perpajakan bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, mempercepat pengolahan data, serta meningkatkan transparansi. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan infrastruktur yang mendukungnya.

BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah telah berupaya mengimplementasikan sistem penerimaan pajak berbasis teknologi. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang cukup kompleks dan mempengaruhi efektivitas sistem yang ada. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Banyak pegawai di lingkungan BPPRD yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan dan mengelola sistem perpajakan digital. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan sistem secara optimal dan masih ditemukannya proses manual dalam administrasi perpajakan.

Selain itu, dari aspek infrastruktur, terdapat hambatan yang cukup signifikan, yaitu lokasi server yang tidak berada di dalam kantor BPPRD. Server sistem penerimaan pajak saat ini ditempatkan di luar instansi, yang secara teknis membatasi kemampuan tim BPPRD dalam mengontrol, memelihara, dan menangani gangguan teknis secara langsung. Ketika terjadi kendala teknis atau kerusakan sistem, proses penyelesaian masalah menjadi lebih lambat karena staff kantor harus keluar dari kantor dan menuju lokasi server untuk menyalakan kembali secara manual. Situasi ini tentu dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada wajib pajak dan menimbulkan potensi kehilangan data atau keterlambatan pencatatan penerimaan.

Permasalahan lain yang cukup dominan adalah kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri dari pulau-pulau dan rentan terhadap gangguan jaringan listrik. Ketidakstabilan suplai listrik sering kali menyebabkan sistem penerimaan pajak tidak dapat diakses, baik oleh petugas di lapangan maupun oleh pihak internal BPPRD. Gangguan ini tidak hanya menghambat operasional harian, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan yang tersedia.

Ketiga permasalahan utama tersebut keterbatasan SDM, lokasi server yang tidak terjangkau langsung, serta gangguan jaringan listrik secara keseluruhan menjadi tantangan besar dalam upaya optimalisasi sistem penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jika tidak segera diatasi, tantangan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat pencapaian target

PAD, dan memperburuk kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian mendalam guna menganalisis sistem penerimaan pajak daerah yang diterapkan di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis terdorong untuk menelusuri lebih dalam mengenai sistem penerimaan pajak daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul: **“ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI BPPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yaitu : Bagaimana sistem penerimaan pajak daerah yang diterapkan oleh BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud saat ini ?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah yang diajukan lebih terarah dan tidak menimbulkan kesalahan pada penafsiran, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup membahas sistem penerimaan pajak daerah di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem penerimaan pajak daerah yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

1. Bagi Instansi

Penelitian ini memberikan informasi bagi BPPRD untuk mengevaluasi sistem penerimaan yang saat ini digunakan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem dan membantu merancang perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini memberikan manfaat bagi institusi dalam hal pengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas pengajaran, dan diharapkan hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya terutama yang mengangkat penelitian mengenai Sistem informasi akuntansi. Sehingga informasi yang didapatkan oleh peneliti saat ini dapat membantu dalam pembuatan penelitian di masa mendatang.

3. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem informasi akuntansi, khususnya dalam konteks perpajakan daerah. Peneliti juga akan memperoleh keterampilan dalam analisis data, serta pemahaman tentang hubungan antara teknologi informasi dalam sistem penerimaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani *Systema* yang artinya kesatuan. Pengertian sistem secara umum adalah suatu kelompok dari bagian – bagian tertentu yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem abstrak adalah suatu susunan yang teratur berupa gagasan atau konsepsi yang saling bergantung (Arianto Pradana & Ibnu Hardi, 2021)

2.2 Informasi.

Menurut (Saeful Malik & Zein, 2022) Informasi adalah data yang telah di klasifikasi atau diolah diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan Informasi merupakan hasil olahan data yang bersifat sementara tergantung dengan waktu, mampu meberi kejutan pada yang menerima nya, .Intensitas dan lamanya kejutan dari informasi disebut nilai informasi. Informasi yang tidak mempunyai nilai, biasanya karena rangkaian data yang tidak lengkap atau kedarluarsa.

Informasi dapat juga dikatakan sebagai data yang telah diproses, yang mempunyai nilai tentang tindakan atau keputusan. Manfaat informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani *Systema* yang artinya kesatuan. Pengertian sistem secara umum adalah suatu kelompok dari bagian – bagian tertentu yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem abstrak adalah suatu susunan yang teratur berupa gagasan atau konsepsi yang saling bergantung (Arianto Pradana & Ibnu Hardi, 2021).

2.3 Akuntansi

Pengertian Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan 12 informasi tentang kondisi ekonomi suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.

Definisi Akuntansi (Sinaga & Juniarto, 2022) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomis, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Definisi Akuntansi Menurut (Sinaga & Juniarto, 2022) Akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah data transaksi dan menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan selain itu akuntansi juga menginterpretasikan informasi akuntansi yang diterimanya. Sedangkan pengertian Akuntansi Menurut Dr.Mamduh M. Hanafi, MBA dan Abdul Halim (Sinaga & Juniarto, 2022) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi yang bisa dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.

Berdasarkan uraian pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan.

2.4 Sistem Penerimaan Kas

Sistem penerimaan kas mencakup kas yang diterima oleh perusahaan, baik dalam bentuk uang tunai maupun surat-surat berharga yang dapat segera digunakan. Sumbernya berasal dari berbagai transaksi, seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lain yang dapat menambah kas perusahaan." Dengan adanya kegiatan penerimaan kas, perusahaan perlu menyusun sistem prosedur yang ketat untuk mengendalikan secara internal proses penerimaan kas tersebut. (Herman et al., 2024)

Dari segi akuntansi, kas adalah segala sesuatu (baik dalam bentuk uang maupun bukan) yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau pelunasan kewajiban. Termasuk dalam kas adalah rekening giro di bank (cash in bank) dan

uang kas yang sedang digunakan (cash on hand). Kas dalam perspektif akuntansi merupakan hal yang paling likuid (cair), sehingga dalam neraca ditempatkan paling atas dalam kelompok yang paling likuid.(Herman et al., 2024)

berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu prosedur pencatatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai sumber, yaitu dari penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman, dan setoran modal baru.

2.5 Sistem Pengendalian Intern

Menurut (Mulyadi, 2023) menerangkan sistem pengendalian internal adalah struktur dan metode organisasi dan metode dengan menggunakan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan guna untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari struktur organisasi, rencana, metode dan langkah-langkah yang telah terkoordinasikan yang berguna untuk menjaga keamanan aset perusahaan, meningkatkan efektivitas dan efesiensi operasional, dan mendukung penerapan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak manajerial. Kesek et al., (2021) Mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tdntang pencapaian empat golongan tujuan berikut ini:

- 1) kehandalan pelaporan keuangan,
- 2) menjaga kekayaan dan catatan organisasi,
- 3) efektivitas dan efesiensi operasi, dan
- 4) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

2.5.1 Unsur-unsur SPIP

Menurut (Mulyadi, 2023) Unsur – unsur sistem pengendalian internal yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian

tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.6 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat serta pembangunan daerah.(Mangeber et al., 2024). Pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, salah satunya digunakan untuk membiayai pembangunan. Ciri-ciri pajak daerah menurut (Mangeber et al., 2024) yaitu:

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).

4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

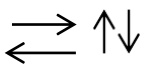
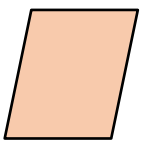
Berdasarkan undang – undang no 33 tahun 2004 tentang petimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mennyatakan tentang pengertian pendapatan asli daerah, yaitu : pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas sedangkan pengertian pendaptan asli daerah menurut (Khikmawati & Furqon, 2023) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dariu sumber ekonomi asli daerah.

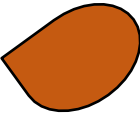
Dalam keadaan seperti ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih mampu memanfaatkan sumber daya keuangan, namun hanya dalam batas undang – undang yang berlaku secara tegas diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pendanaan daerah. Kebutuhan akan PAD yang lebih besar semakin meningkat seiring dengan besarnya kekuasaan pemerintah yang di berikan kepada daerah

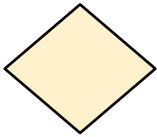
2.8 Flowchart

Flowchart adalah gambaran atau bagan yang di gunaka untuk menggambarkan langkah-langkah dalam proses sistemats atau visual. Flowchart dapat membantu kta dalam memahami proses kerja dengan melihat urutan kegiata, dan arah aliran informasi atau data.

Tabel 1 Flowchart

	<i>Flow</i> Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara symbol satu dengan symbol yang lain.		<i>Input/output</i> Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung
---	--	--	---

			peralatan.
	<i>On-Page Reference</i> Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.		Manual <i>Operation</i> Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	<i>Off-Page Reference</i> Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.		Document Simbol yang menyatakan bahwa <i>input</i> berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.		Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedur.
	<i>Process</i> Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.		<i>Display</i> Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan
	<i>Decision</i>		<i>Preparation</i>

	Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.		Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.
---	--	--	---

2.9 Peneliti Terdahulu

Tabel 2 Peneliti Terdahulu

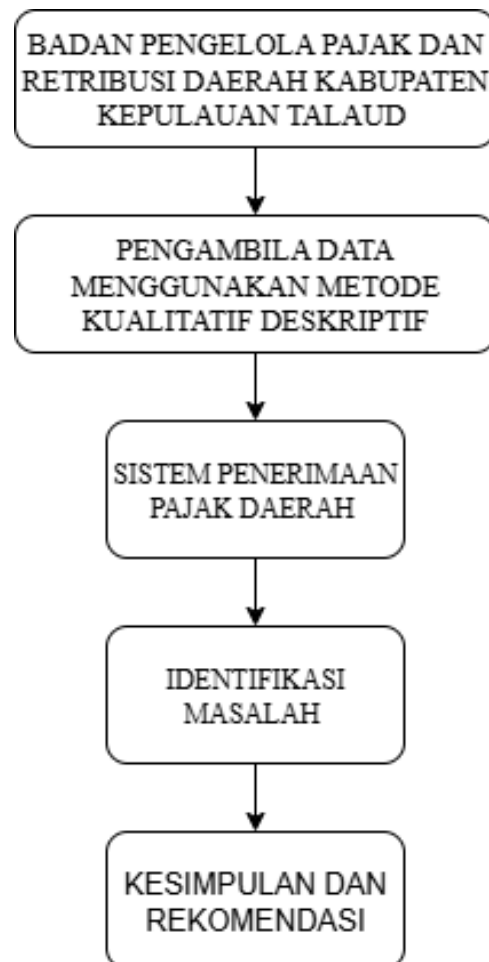
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arwin,Besse, Faradiba , Wardianto (2021)	Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa	Berdasarkan penelitian bahwa Penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Gowa secara umum sangat efektif yakni diatas 100%, walaupun ditemukan berbagai jenis pajak daerah pada periode tahun 2013-2018 berfluktuasi dan adapun faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah yang ada di kabupaten gowa, yaitu kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sistem pengawasan pemungutan pajak daerah yang berjalan dengan baik serta mekanisme dalam memungut pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
2.	Sandy Robert Mangeber, Robert Lambey, Steven J. Tangkuman (2024)	Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang	Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten SITARO tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif dengan persentase

		Biaro (SITARO)	rata-rata realisasi penerimaan sebesar 94%.
3.	Nehemiah J. G. Sembor, Hendrik Gamaliel, Lidia M. Mawikere(2023)	Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado	Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka Penerimaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Realisasi terhadap target pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yakni mencapai Rp. 71,905,821,095 dengan persentase 126.59% dan realisasi Pajak restoran paling rendah terdapat pada tahun 2020 yakni Rp. 51,532,695,823 dengan persentase hanya 55.42%.
4.	Pertiwi Zulmarni, Yuliarti Yuliarti (2014)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang	Analisis efektivitas pada pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Padang sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah Kota Padang dilihat dari pengukuran tingkat efektivitas menurut Duncan (dalam Tanjung, 2021:

			270)
5.	Lena Islamiyatun, Supanji Setyawan, Suci Nasehati Sunaningsih (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang	Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, kemudian dihitung melalui analisis rasio kontribusi yang bertujuan untuk mempermudah peneliti mengetahui secara jelas dan lengkap mengenai kisaran penerimaan pajak daerah dari tahun 2018-2020 (Mustoffa, 2018). Kontribusi pajak daerah akan sangat baik apabila hasil perhitungan analisis rasio dapat mencapai angka 50% (Departemen Dalam Negeri, 2015)

2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif deskriptif, Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis bagaimana sistem penerimaan di lakukan dalam pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini menghasilkan data berupa uraian tertulis yang di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak – pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan sistem. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses pelaksanaan, kendala, serta efektifitas penggunaan sistem penerimaan dalam mendukung pengelolaan pajak daerah.

Dengan pendekatan ini penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem penerimaan di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud serta untuk menganalisis sejauh mana sistem tersebut membantu dalam pengelolaan pajak daerah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari – Mei Tahun 2025.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan :

1. Data Primer

Data ini di dapatkan secara langsung dari hasil wawancara dan observasi oleh peneliti pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) atau data yang diperoleh secara langsung dari Kepala Badan dan staff bagian pajak untuk mendapatkan data yang objektif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada, diperoleh dari peneliti terdahulu atau sumber – sumber yang memperhatikan langsung beberapa aktivitas dan juga kondisi yang terjadi berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu buku, jurnal, literatur, dan juga media internet .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Metode pengumpulan data penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan memperhatikan aktivitas mengenai bagaimana Sistem penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan kepala Badan dan karyawan bagian pajak untuk memperoleh tentang bagaimana sistem penerimaan pajak daerah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan memperhatikan aktivitas dan juga kondisi yang terjadi berkaitan dengan sistem penerimaan pajak daerah.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode dengan mengumpulkan data sehingga memperoleh gambaran tentang masalah yang dihadapi. Dari data tersebut peneliti dapat membandingkan dan menganalisis sistem informasi akuntansi terhadap sistem penerimaan. Teknik analisis penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran umum perusahaan
2. Mengambil data dengan melakukan wawancara tentang sistem penerimaan pajak daerah
3. Mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan Sistem penerimaan pajak daerah
4. Menganalisis mekanisme sistem informasi akuntansi terhadap sistem penerimaan
5. Menarik kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

Gambar 2 Profil Perusahaan



Kabupaten Kepulauan Talaud secara resmi dibentuk berdasarkan UU No 8 Tahun 2002. Pada Tahun 2016, pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud melalui penggabungan dari Dinas Pengelolaan, Pendapatan Dan Aset Daerah. Pembentukan lembaga ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 56 tahun 2016 tentang : Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bupati Kepulauan Talaud.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan strategis dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi. Keberadaan BPPRD menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan yang

bersumber dari masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

BPPRD adalah lembaga pemerintah daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Lembaga ini memiliki tugas pokok dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi penerimaan daerah dari sektor:

Pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta berbagai jenis retribusi daerah. Melalui tugas tersebut, BPPRD diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada di wilayah perbatasan utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten ini secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Posisi strategis ini menuntut adanya kelembagaan yang kuat dan profesional dalam mengelola potensi-potensi penerimaan daerah guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan wilayah perbatasan.

Sebelum BPPRD terbentuk, pengelolaan pendapatan daerah berada dalam lingkup kerja Dinas Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah (DPPAD). Seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka efisiensi birokrasi serta peningkatan kinerja pengumpulan PAD, maka pada tahun 2016 dilakukan pembentukan badan tersendiri yang secara khusus menangani urusan pajak dan retribusi daerah.

Pembentukan BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa oleh Bupati Kepulauan Talaud. Peraturan ini menjadi dasar hukum pembentukan dan operasional BPPRD sebagai lembaga yang otonom dan fokus terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Sejak dibentuk pada tahun 2016, BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan, sebagai berikut:

1. Gustaf Atang, STP., MM

Menjabat sebagai Kepala BPPRD pertama. Dalam masa kepemimpinannya, ia membangun struktur awal organisasi dan sistem kerja BPPRD.

2. Melksion Saweduling, ST., ME

Melanjutkan pembenahan internal dan penguatan sistem administrasi pajak serta memperluas jangkauan pelayanan pajak daerah.

3. Situ H. Bidulang, S.IP., ME

Fokus pada digitalisasi layanan serta mendorong inovasi dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak berbasis elektronik.

4. Jakson Parapaga, ST., ME (menjabat hingga sekarang)

Saat ini, di bawah kepemimpinan beliau, BPPRD terus berupaya meningkatkan rasio pajak, memperluas basis wajib pajak, serta memodernisasi layanan untuk mendukung target pendapatan daerah yang berkelanjutan.

BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan motor penggerak dalam penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan dasar hukum yang kuat, struktur organisasi yang jelas, serta kepemimpinan yang berkelanjutan, BPPRD terus melakukan transformasi dan inovasi demi meningkatkan penerimaan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan.

4.1.2 Visi Misi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Visi

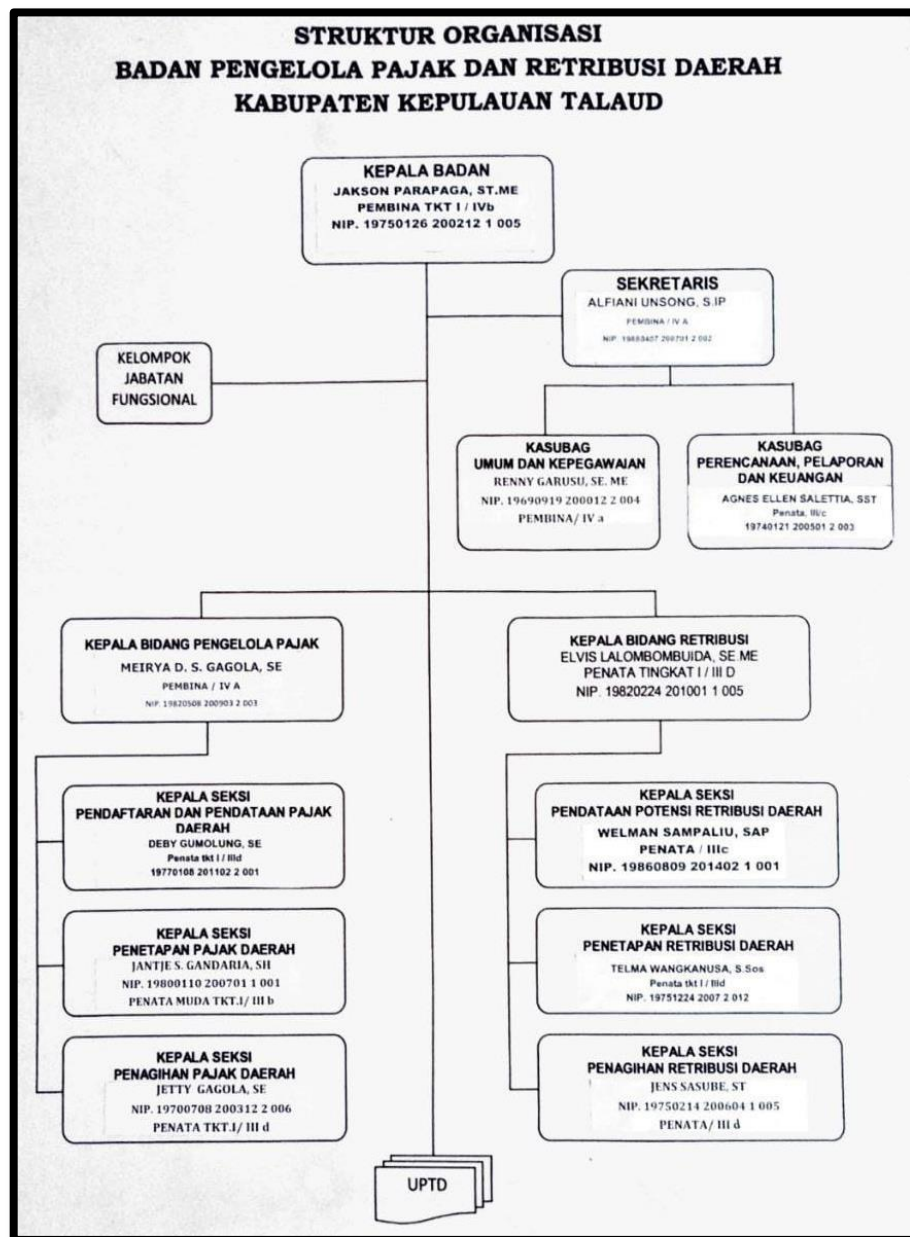
“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud Lebih Diberkati”

Misi

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih
2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok
3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah
4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Berlandaskan Pada Kasih
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Talaud

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 3 Struktur Organisasi



4.1.4 Uraian Pekerjaan

1. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 1. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 2. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang tersebut
 3. Menyusun norma, standar operasional, dan prosedur teknis

4. Memberikan arahan teknis serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Menyusun rancangan kebijakan teknis dan perencanaan dalam bidang evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang tersebut
 2. Mengembangkan rencana kerja dan anggaran tahunan
 3. Melakukan koordinasi lintas bagian dalam perencanaan dan pelaporan anggaran
 4. Mengelola administrasi keuangan dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban
 5. Menyusun standar pelayanan, pelaporan kinerja, serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 6. Menangani surat-menyurat, arsip, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas
 7. Mengumpulkan serta mengelola data dan informasi internal lembaga
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Menyediakan bahan kebijakan dan program kerja di bidang kepegawaian dan urusan umum M
 2. Mengurus dokumen administrasi, perlengkapan kantor, dokumentasi, serta rumah tangga Menyiapkan bahan
 3. Mengelola urusan personalia dan pengembangan SDM;
 4. Melaksanakan tugas administratif dan kedinasan sesuai dengan arahan sekretaris badan.
4. Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, serta penagihan pajak daerah
 2. Mengelola dokumen perpajakan, menerbitkan surat ketetapan, dan melakukan penagihan Pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penetapan pajak daerah
 3. Melakukan pembinaan serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan kinerja bidang.

5. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Menyusun program dan kebijakan teknis terkait pendaftaran serta pendataan pajak daerah
 2. Melakukan pendaftaran objek/subjek pajak dan penerbitan NPWPD menyiapkan bahan dan melak
 3. Mengelola buku induk wajib pajak serta menyusun laporan kerja bidang.
6. Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penetapan pajak daerah menyiapkan bahan dan
 2. Menghitung, menetapkan, serta menerbitkan SKPD
 3. Menangani keberatan dan keringanan pajak serta menyusun laporan kinerja subbidang.
7. Kepala Bidang Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Merumuskan kebijakan teknis terkait pendataan, penetapan, dan penagihan retribusi daerah
 2. Melakukan koordinasi, perencanaan, serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tersebut
 3. Menyusun dokumen retribusi serta laporan anggaran dan kinerja bidang.
8. Kepala Seksi Pendataan Potensi Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Menyusun kebijakan teknis pendataan potensi retribusi
 2. Melaksanakan pencatatan objek dan subjek retribusi serta mengelola informasi dan pelaporan terkait
9. Kepala Subbidang Penetapan Retribusi Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan teknis penetapan retribusi

2. Menghitung dan menetapkan besaran retribusi serta menyusun laporan kinerja subbidang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Sistem Penerimaan di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa sistem penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik dan Perbup Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

4.2.2 Mekanisme Pelayanan dan Prosedur

Sistem pemungutan pajak di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum melalui tahapan berikut :

1. Pendaftaran Wajib Pajak (WP)

Wajib pajak mendaftarkan usaha atau objek pajaknya ke BPPRD untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

2. Penetapan Pajak

Berdasarkan laporan atau data dari wajib pajak, BPPRD menetapkan pajak terutang

3. Pembayaran Pajak

Wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank SulutGo atau melalui kanal elektronik seperti QRIS, E-Bangking

4. Pelaporan dan Pengawasan

BPPRD Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap laporan WP, Serta tindakan penagihan apabila terjadi keterlambatan

4.2.3 Flowchart Penerimaan

Gambar 4 Flowchart Penerimaan



4.2.4 Sistem Informasi Pajak Daerah

BPPRD Talaud telah mulai mengimplementasikan sistem informasi pajak daerah berbasis digital. Sistem informasi yang digunakan melalui 2 aplikasi diantaranya :

1. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Jenis pajak yang dikelola :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Bebatuan (MBLB)
2. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

Jenis pajak yang dikelola :

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Beberapa karakteristik utama dari sistem yang berjalan saat ini antara lain:

1. Berbasis Web: Sistem ini digunakan untuk input dan rekapitulasi data pajak. Namun, aksesnya terbatas untuk pegawai internal, dan belum memungkinkan wajib pajak mengakses informasi secara mandiri (belum ada portal wajib pajak).
2. Server Eksternal: Seluruh data dan sistem tersimpan di server yang dikelola oleh pihak ketiga di luar kantor BPPRD. Akses ke server ini memerlukan izin dan kerja sama dari penyedia layanan TI, sehingga kontrol langsung dari BPPRD sangat terbatas.
3. Penggunaan Sistem Masih Terbatas: Tidak semua jenis pajak dimasukkan ke dalam sistem ini. Beberapa jenis pajak, terutama yang dikelola di tingkat kecamatan, masih dicatat secara manual dan dilaporkan secara berkala ke BPPRD.
4. Monitoring dan Evaluasi Belum Optimal: Belum ada dashboard analitik atau sistem monitoring berbasis real-time untuk memantau penerimaan pajak. Data sering diolah secara manual dalam bentuk Excel untuk membuat laporan bulanan.
5. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur: Beberapa pegawai kesulitan mengakses sistem karena kendala jaringan internet atau ketidaktahuan cara penggunaan sistem.

Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, dalam praktiknya belum mampu menggantikan proses manual sepenuhnya karena berbagai kendala teknis dan non-teknis.

4.2.5. Permasalahan yang Ditemukan

Dalam pelaksanaan sistem penerimaan pajak daerah, BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud menghadapi beberapa masalah utama, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Kurangnya Tenaga Ahli TI

BPPRD belum memiliki staf khusus yang secara profesional menangani sistem informasi perpajakan. Sebagian besar pegawai berlatar belakang administrasi dan belum memiliki pelatihan teknis yang cukup.

- 2) Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan penggunaan sistem sangat jarang dilakukan. Pegawai yang baru bergabung belum mendapat pelatihan menyeluruh, sehingga masih mengandalkan metode lama (manual).

- 3) Ketergantungan pada Operator Terbatas

Hanya beberapa pegawai yang benar-benar memahami sistem, sehingga saat pegawai tersebut tidak hadir, proses input dan pelaporan data menjadi terhambat.

2. Lokasi Server Tidak Berada di Dalam Kantor

- 1) Server Berlokasi di Luar Kantor

Sistem dan database dikelola oleh penyedia layanan TI yang berkantor di luar Talaud. Akibatnya, BPPRD tidak bisa langsung mengakses server untuk maintenance, backup, atau troubleshooting.

- 2) Lambatnya Penanganan Gangguan Teknis

Jika terjadi error atau sistem tidak bisa diakses, BPPRD harus menunggu bantuan dari pihak penyedia. Hal ini menimbulkan keterlambatan dalam pelayanan dan potensi kehilangan data.

- 3) Minimnya Backup Otomatis

Proses pencadangan data tidak berlangsung otomatis. Risiko kehilangan data cukup besar jika terjadi kerusakan sistem mendadak.

3. Gangguan Jaringan Listrik dan Internet

- 1) Pemadaman Listrik yang Sering Terjadi

Beberapa kantor pelayanan pajak, khususnya di kecamatan, kerap mengalami pemadaman listrik yang menyebabkan komputer dan sistem tidak dapat diakses.

2) Koneksi Internet Tidak Stabil

Di daerah terpencil atau pulau-pulau luar, sinyal internet sangat terbatas. Akibatnya, proses pelaporan data dari petugas lapangan ke BPPRD pusat mengalami keterlambatan.

3) Tidak Tersedianya Genset atau UPS

Fasilitas pendukung seperti genset atau UPS belum tersedia di sebagian besar kantor pelayanan pajak, sehingga saat listrik padam, semua kegiatan langsung terhenti.

4.2.6 Dampak Permasalahan terhadap kinerja sistem penerimaan

Permasalahan yang diidentifikasi pada BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan dampak nyata terhadap kinerja sistem penerimaan pajak. Dampak tersebut meliputi:

1. Ketidak efisienan Proses Administrasi Karena keterbatasan SDM dan gangguan sistem, proses input data pajak masih harus dilakukan secara manual di banyak kasus. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan laporan dan rekapitulasi bulanan.
2. Kualitas Data Tidak Konsisten Sering terjadi ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan data realisasi karena kurangnya kontrol kualitas data. Kesalahan input manual semakin memperbesar potensi inkonsistensi.
3. Terganggunya Layanan kepada Wajib Pajak Ketika sistem tidak dapat diakses, pelayanan kepada masyarakat, seperti cetak bukti pembayaran atau pengecekan tagihan, menjadi terhambat. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
4. Tidak Tercapainya Target PAD Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target karena keterlambatan pelaporan dan pengelolaan data yang belum maksimal.

4.2.7 Tingkat realisasi penerimaan pajak daerah

Sumber data yang berasal dari dokumentasi laporan penetapan dan realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing jenis pajak daerah dengan perhitungan presentase sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Penetapan}} \times 100\%$$

1. Penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun 2021- 2024

Gambar 5 Penetapan dan Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	51.000.000	31.704.319	19.295.681	62%
2022	51.000.000	28.857.500	22.142.500	57%
2023	51.000.000	50.889.500	110.500	99,78%
2024	59.728.493	16.203.000	43.525.493	27%

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 31.704.319 atau 62% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 51.000.000. Tahun 2022 realisasi penerimaan menurun sebesar Rp. 28. 857.500 atau 57% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 51.000.000. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.889.500 atau 99,87% namun belum berhasil mencapai target penetapan sebesar Rp. 51.000.000. Tahun 2024 realisasi penerimaan kembali menurun sebesar Rp. 16.203.000 atau 27% dan tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 59.728.493.

2. Penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun 2021- 2024

Gambar 6 Penetapan dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	1.040.000.000	869.728.967	170.271.033	83,63%
2022	1.050.000.000	875.211.257	174.788.743	83,35%
2023	1.451.000.000	957.313.580	493.686.420	65,96%
2024	1.229.704.237	827.441.874	402.262.363	67,29%

Berdasarkan gambar 6 menunjukkan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 869.728.967 atau 83,63% tidak mencapai target

penetapan sebesar Rp. 1.040.000.000. Tahun 2022 realisasi penerimaan sebesar Rp. 875.211.257 atau 83,35% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 1.050.000.000. Tahun 2023 realisasi penerimaan sebesar Rp. 957.313.580 atau 65,96% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 1.451.000.000. Tahun 2024 realisasi penerimaan sebesar Rp. 827.441.874 atau 67,29% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 1.229.704.237.

3. Penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021- 2024

Gambar 7 Penetapan dan Realisasi Pajak Hiburan

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	10.000.000	1.050.000	8.950.000	10,50%
2022				
2023				
2024				

Berdasarkan gambar 7 menunjukkan realisasi penerimaan hanya terjadi di tahun 2021 di mana realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1050.000 atau 10,50% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 10.000.000.

4. Penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2021-2024

Gambar 8 Penetapan dan Realisasi Pajak Reklame

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	75.000.000	17.173.125	57.826.875	22,90%
2022	75.000.000	24.369.575	50.630.425	32,49%
2023	75.000.000	45.554.063	29.445.937	60,74%
2024	87.836.016	72.306.525	15.529.491	82,30%

Berdasarkan gambar 8 menunjukan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 17.173.125 atau 22,90% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 75.000.000. Tahun 2022 realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.369.575 atau 32,49% namun belum mencapai target penetapan sebesar Rp. 75.000.000. Tahun 2023 realisasi penerimaan kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.554.063 atau 60,74% namun belum nerhasil mencapai target penetapan sebesar Rp. 75.000.000. Tahun 2024 realisasi penerimaan sebesar Rp. 72.306.525 atau 82,30% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 87.836.016.

5. Penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021-2024

Gambar 9 Penetapan dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	2.528.611.313	2.892.043.331	- 363.432.018	114,36%
2022	2.528.611.313	3.388.322.700	- 859.711.387	133,97%
2023	3.528.611.313	3.476.795.427	51.815.886	98,53%
2024	2.961.375.282	3.572.386.618	- 611.011.336	120,65%

Berdasarkan gambar 9 menunjukkan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 2.893.043.331 atau 114,36% mencapai target penetapan sebesar Rp. 2.528.611.313. Tahun 2022 realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.388.322.700 atau 133,97% mencapai target penetapan sebesar Rp. 2.528.611.313. Tahun 2023 realisasi penerimaan sebesar Rp 3.476.795.427 atau 98,53% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp 3.528.611.313. Tahun 2024 realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.572.386.618 atau 120,65% mencapai target penetapan sebesar Rp. 2.961.375.282.

6. Penetapan dan realisasi penerimaan pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan (MBLB) Tahun 2021-2024

Gambar 10 Penetapan dan Realisasi Pajak MBLB

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	1.499.557.509	294.013.937	1.205.543.572	19,61%
2022	1.616.557.509	813.131.970	803.425.539	50,28%
2023	2.165.557.509	710.016.868	1.455.540.641	32,78%
2024	1.893.226.304	257.975.150	1.635.251.154	13,63%

Berdasarkan gambar 10 menunjukkan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 294.013.937 atau 19.61% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 1.499.557.509. Tahun 2022 realisasi penerimaan sebesar Rp. 803.425.539 atau 50,28% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 1.616.557.509. Tahun 2023 realisasi penerimaan sebesar Rp. 710016.868 atau 32,78% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp.

2.165.557.509. Tahun 2024 realisasi penerimaan sebesar Rp. 257.975.150 atau 13,63% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 1.893.226.304.

7. Penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021-2024

Gambar 11 Penetapan dan Realisasi Pajak PBB- P2

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	2.523.460.328	2.389.833.042	133.627.286	94,71%
2022	2.529.813.597	2.119.411.108	410.402.489	75,31%
2023	4.029.813.597	2.124.367.040	1.905.446.557	52,72%
2024	2.962.783.334	1.407.907.606	1.554.875.728	47,52%

Berdasarkan gambar 11 menunjukkan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 2.389.833.042 atau 94,71% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 2.523.460.328. Tahun 2022 realisasi penerimaan sebesar Rp. 2.119.411.108 atau 75,31% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 2.529.813.597. Tahun 2023 realisasi penerimaan sebesar Rp. 2.124.367.040 atau 52,72% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 3.029.813.597. Tahun 2024 realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.407.907.606 atau 47,52% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 2.962.783.334.

8. Penetapan dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Gambar 12 Penetapan dan Realisasi Pajak BPHTB

Tahun	Penetapan	Realisasi	Selisih lebih (kurang)	Persentase
2021	223.353.269,00	298.910.963	- 75.557.694	133,78%
2022	100.000.000	110.974.605	- 10.974.605	110,97%
2023	150.000.000,00	84.218.865	65.781.135	56,15%
2024	117.114.689,00	9.606.400	107.508.289	8,20%

Berdasarkan gambar 12 menunjukkan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 298.910.963 atau 133,78% mencapai target penetapan sebesar Rp. 223.353.369. Tahun 2022 realisasi penerimaan sebesar Rp. 110.974.605 atau 110,97% mencapai target penetapan sebesar Rp. 100.000.000.

100.000.000. Tahun 2023 realisasi penerimaan sebesar Rp. 84.218.865 atau 56,15% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 150.000.000. Tahun 2024 reaslisasi penerimaan sebesar Rp. 9.606.400 atau 8,20% tidak mencapai target penetapan sebesar Rp. 117.114.689.

4.4 Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem penerimaan pajak pada BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud telah disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan berbagai Peraturan Bupati pendukung. Dalam, implementasi sistem penerimaan masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Digitalisasi melalui SIMPATDA dan SISMIOP telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif. Akses sistem masih terbatas, server berada di luar kantor, dan pelaporan di beberapa wilayah masih dilakukan secara manual. Selain itu, keterbatasan SDM, gangguan infrastruktur listrik dan internet, serta kurangnya monitoring berbasis teknologi menjadi hambatan utama. Dampak dari permasalahan ini tercermin pada realisasi penerimaan beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama periode 2021 hingga 2024 tidak pernah mencapai target. Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2023 dan 2024, serta Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2023 juga mengalami hal serupa. Adapun jenis pajak yang berhasil mencapai target hanya Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2021, 2022, dan 2024, serta BPHTB pada tahun 2021 dan 2022.

Jika dibandingkan dan disesuaikan dengan teori komponen pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2023) yaitu :

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud telah menunjukkan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas antara unit, seperti kepala badan, sekretariat, bidang pajak, dan bidang retribusi. Hal ini sesuai dengan prinsip pengendalian intern menurut Mulyadi, dimana struktur organisasi harus mendukung pemisahan fungsi secara tegas. Namun, dalam pelaksanaannya masih

terdapat tumpang tindih tugas, terutama dalam pengelolaan sistem informasi dan pelaporan pajak. Misalnya, tidak adanya staf khusus bagian Teknologi Informasi (TI) menyebabkan staf bagian lain harus merangkap tugas teknis, yang pada akhirnya menimbulkan beban kerja tidak seimbang dan beresiko terhadap ketetapan serta keandalan data.

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

BPPRD telah menggunakan aplikasi SIMPATDA dan SISMIOP untuk mencatat dan mengelola pajak daerah. Penggunaan dokumen seperti surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan bukti pembayaran menjadi bagian dari sistem pencatatan ini. Namun, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan belum berjalan konsisten. Selain itu, dokumen pendukung dari wajib pajak yang sering tidak lengkap atau terlambat diserahkan menyebabkan keterlambatan dalam proses penetapan dan pelaporan pajak, yang menunjukkan lemahnya pengendalian dalam prosedur pencatatan.

3. Praktik Yang Sehat

Secara procedural, praktik administrasi di BPPRD telah mengatur mekanisme penetapan, penagihan, dan pelaporan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya menunjukkan praktik yang sehat. Masih ditemukan proses manual yang seharusnya sudah dapat digantikan dengan sistem digital, kurangnya pengawasan terhadap data yang dimasukkan, serta lemahnya koordinasi antara bagian menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal. Ketidak konsistenan data antara laporan internal dan realisasi di lapangan merupakan salah satu indikasi bahwa praktik administratif belum berjalan sesuai standar yang baik.

4. Mutu Karyawan Sesuai Dengan Tanggung Jawab

Sebagian besar pegawai BPPRD telah memahami tugas pokoknya dengan baik. Namun, kompetensi teknis, khususnya dalam pengoperasian sistem informasi perpajakan masih terbatas. Tidak adanya pelatihan berkala dan belum tersedianya tenaga ahli TI berdampak pada lambatnya proses input data, serta meningkatnya potensi kesalahan dalam pencatatan. Ketergantungan terhadap segelintir pegawai yang menguasai sistem juga menjadi kelemahan structural, karena jika pegawai tersebut tidak hadir, maka seluruh proses dapat terhambat.

Akibat terjadinya kerusakan pada server, proses operasional yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pajak menjadi terganggu. Hal ini dikarenakan tidak berfungsinya kedua aplikasi utama yaitu simpatda dan sismiop, yang selama ini digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan data dan pelayanan pajak daerah. Ketika sistem digital tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) terpaksa mengambil langkah alternatif sebagai solusi sementara memanfaatkan aplikasi berbasis microsoft excel guna menggantikan peran sistem yang sedang mengalami kendala teknis tersebut. Penggunaan excel ini bersifat darurat dan manual, serta menjadi pilihan sementara untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan penerimaan pajak daerah agar tidak terhenti secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem penerimaan pajak daerah di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud telah disusun berdasarkan kerangka hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan didukung oleh peraturan teknis lainnya. Proses pemungutan pajak meliputi tahapan pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pelaporan, serta mulai mengimplementasikan digitalisasi melalui aplikasi SIMPATDA dan SISMIOP.
2. Implementasi sistem digital masih belum berjalan optimal. Akses sistem terbatas, belum terdapat portal mandiri untuk wajib pajak, dan sebagian besar pengolahan data masih dilakukan secara manual. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan gangguan listrik, semakin menghambat efektivitas sistem.
3. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, baik dalam hal kuantitas maupun kompetensi teknis, menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sistem informasi perpajakan. Ketergantungan pada operator tertentu menyebabkan proses terganggu saat tenaga tersebut tidak tersedia. Selain itu, pelatihan sistem belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan.
4. Permasalahan teknis dan non-teknis yang terjadi berdampak langsung pada kinerja sistem penerimaan pajak, seperti keterlambatan pelaporan, kualitas data yang tidak konsisten, layanan yang terganggu, dan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tercermin dari data realisasi penerimaan pajak daerah, di mana mayoritas jenis pajak tidak mencapai target sepanjang tahun 2021–2024, kecuali Pajak Penerangan Jalan (2021, 2022, dan 2024) dan BPHTB (2021 dan 2022).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penguatan SDM dan Pelatihan teknologi

BPPRD perlu menambah tenaga profesional di bidang teknologi informasi (TI) dan memberikan pelatihan rutin kepada seluruh pegawai, terutama yang terkait langsung dengan pengelolaan sistem informasi perpajakan. Perlu disusun SOP pelatihan yang berkelanjutan agar setiap pegawai memahami alur sistem dan mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

2. Pengembangan infrastruktur dan akses sistem

Pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur penunjang seperti jaringan internet yang stabil, perangkat cadangan (Genset), dan membangun sistem backup otomatis. BPPRD juga disarankan untuk mengembangkan portal layanan wajib pajak secara daring agar wajib pajak dapat mengakses informasi, melakukan pembayaran, dan pelaporan tanpa harus datang langsung ke kantor.

3. Evaluasi dan reposisi server

Mengupayakan agar lokasi server dapat di pindahkan ke kantor BPPRD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak kedua. Dan perlu dilakukan audit sistem TI secara berkala agar keamanan dan ketersediaan data tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Pradana Arianto, A. P., & Ibnu Hardi, I. H. (2021). Sistem Informasi Alat Kesehatan Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.51903/juisi.v1i1.257>
- Arwin, A., Faradiba, B., & Wardianto, W. (2021). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 28–39. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i1.131>
- D. Alita, S. Priyanta, and N. R. 2019. (2014). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Endaryati, E. (2021). Sistem Informasi Akuntansi. In *Yayasn Prima Agus Teknik*.
- Herman, S., Idrus, M., & Samsinar. (2024). Jurnal Mirai Management Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Dealer Motor PT Astra Honda Sidrap. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 23–33.
- Islamiyatun, L., Setyawan, S., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. *JEAM: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), 312–324.
- Khikmawati, I., & Furqon, I. K. (2023). analisis efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten semarang *Jurnal Sahmiyya | P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100. Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 287.
- Lambey, S. R., Mangeber, R., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 165–179. <https://doi.org/10.58784/rapi.151>
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi*, Edisi 4. <https://play.google.com/store/books/details?id=f4ncEAAAQBAJ>
- malik saeful, D., & Zein, A. (2022). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Online Berbasis Web Menggunakan Metode Personal Extreme Programing Di Toko Surya Gemilang. 51 | *Jurnal Ilmu Komputer JIK*, V(01), 51–56.
- Sembor, N., Gamaliel, H., & Mawikere, L. M. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 599–608. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.49828>
- Sinaga, L., & Juniarso, A. (2022). Analisis Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Koperasi Simpan Pinjam. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 1, 1–13.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat pemberitahuan tagihan pajak daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Bui Batu Komplek Perkantoran Melonguane Telp/Fax 0852 4013 8327	 No. SPTPD : 1062 Masa Pajak : Desember Tahun Pajak : 2024 Kode Bayar : 714102012401062
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN		Kepada Yth : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan.		
1. DATA WAJIB PAJAK		
a. NPWPD : P.1.0000110.11.07 b. Nama Wajib Pajak : MARFEL AXEL KASEGER c. Alamat Wajib Pajak : Melonguane, Rt. 00 , Rw. 00 , Desa Melonguane Timur, Kec. Melonguane, Kab. Talaud d. NLOP : 02.00091.11.07 e. Nama Objek/Usaha : KEIKA FOOD & CAKE f. Alamat Objek/Usaha : Melonguane, Rt. 00, Rw. 00, Desa Melonguane Timur, Kec. Melonguane g. Uraian : Biaya Makan Minum Pertemuan Upaya Penguatan Kesehatan Lansia Tingkat Kab/kota Kantor Dinas Kesehatan		
2. DATA OBJEK PAJAK (DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN)		
3. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMENT		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya : a. Masa Pajak : November b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 32.040.000,- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 10 % d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. 3.204.000,- 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : Desember b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 15.600.000,- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 10 % d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. 1.560.000,-		
4. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
Melonguane, 20 Desember 2024 Wajib Pajak  MARFEL AXEL KASEGER (.....)		

5. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPPRD

Menerima tanggal : 20 Desember 2024
Nama Petugas : DEBY GUMOLUNG, SE
NIP : 197701082011012001

(.....)

No. SPTPD : 1062

TANDA TERIMA

NPWPD : P.1.0000110.11.07
Nama : MARFEL AXEL KASEGER
Alamat : MELONGUANE, RT. 00 , RW. 00 , DESA MELONGUANE TIMUR, KEC. MELONGUANE, KAB. TALAUD
Nama Objek / Usaha : KEIKA FOOD & CAKE

Melonguane, 20 Desember 2024
Yang Menerima



714102012401062

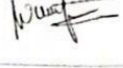
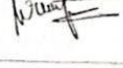
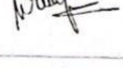
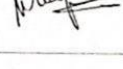

Yuliani Poae
(.....)

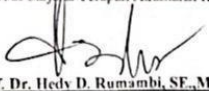
Lampiran 2 Konsultasi Pembimbing 1

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
 Nama Mahasiswa : Wira Malensang / NIM. 21 043 094
 Nama Pembimbing : Wenny A. Ginting, SE.,MSi

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	5 Juni 2025	Reviu BAB I Latar Belakang	
2	6 Juni 2025	Reviu BAB II	
3	9 Juni 2025	Revisi BAB III	
4	11 Juni 2025	Konsultasi BAB IV Hasil Penelitian	
5	13 Juni 2024	Revisi BAB IV Hasil Penelitian & Lanjut Pembahasan	
6	16 Juni 2025	Konsultasi BAB IV Hasil Pembahasan	
7	18 Juni 2025	Buat Abstrak & Lampiran	
8	24 Juni 2025	Siap di Uji	
9			
10			
11			

Menyetujui ; Ketua Jurusan,  Raymond Festus Rombot, SE.,MSi NIP. 197401142003121002	Divalidasi oleh; Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,  Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS NIP. 197002051998022002
---	--

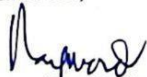
Lampiran 3 Konsultasi Pembimbing 2

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Implementasi Simpatda Dalam Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud
 Nama Mahasiswa : Wira Malenseng / Nim. 21 043 094
 Nama Pembimbing : Meike Kesek, SH.,MAP

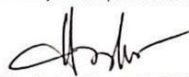
No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	10 Juni 2018	Review Bab I	
2	12 Juni 2018	Review BAB II	
3	16 Juni 2018	Konsultasi BAB III	
4	18 Juni 2018	Konsultasi BAB IV	
5	20 Juni 2018	Konsultasi BAB IV Hasil Pembahasan	
6	23 Juni 2018	Revisi BAB IV Hasil pembahasan	
7	30 Juni 2018	Konsultasi BAB V & Campuran	
8	5 Juli 2018	Siap di uji	
9			
10			
11			
12			

Menyetujui;
Ketua Jurusan,



Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
NIP. 97401142031121002

Divalidasi oleh;
Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,



Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 197002051998022002

Lampiran 4 Lembar Koreksi Ketua Penguji

LEMBAR KOREKSI
KETUA PENGUJI

Nama Mahasiswa : Wira Malensang
NIM : 21 043 094
Judul : Analisis Implementasi Simpatda Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1.	Koreksi judul : Analisis Sistem ^{penerimaan .} pengelolaan Pajak Daerah di BPPRD di Kab. Kepulauan Talaud .	
2.	Latar belakang, rumusan masalah , dst disesuaikan dengan judul .	
3.	Pembahasan mengenai pengendalian internal atas sistem pengelolaan pajak daerah .	
4.	Kutipan diambil dari penulis pertama .	

Lampiran 5 Lembar Koreksi Penguji 1

LEMBAR KOREKSI

PENGUJI 1

Nama Mahasiswa : Wira Malensang
 NIM : 21 043 094
 Judul : Analisis Implementasi Simpatda Dalam Pengelolaan Pajak Daerah
 di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1	Judul diubah: Analisis Sistem ^{Penerimaan} Pengelolaan Pajak Daerah di BPPRD Kab. Kepulauan Talaud	
2.	Pernyataan di muka	
3.	Latar belakang Masalah di muka	
3.	Tinjauan pustaka di muka objek penelitian	
4.	Hasil Penelitian di muka	
5.	Kesimpulan ...	
6.	Objek penelitian dan Sistem apa yang Manual sistem.	
7	Dasar hukum apa.	

Lampiran 6 Lembar Koreksi Penguji 2

LEMBAR KOREKSI
PENGUJI 2

Nama Mahasiswa : Wira Malensang
NIM : 21 043 094
Judul : Analisis Implementasi Simpatda Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1	Judul Berubah: Later Belahang Bab I, Bab II Bab III, Bab IV, Bab V Daftar Pustaka. Disesuaikan.	
2.	Baca Panduan untuk disesuaikan dalam Penulisan.	
3	Penulisan judul. dan sub judul Bab. Perlu disesuaikan. Penggunaan huruf besar.	
4	Bab IV banyak kejanggalan dalam Penempatan data.	
5	Daftar Pustaka di edit kalam bisa dan disesuaikan sesuai aturan penulisan	
6.	Penulisan judul Penelitian terdahulu disesuaikan.	

Lampiran 7 Lembar Asistensi Ketua Penguji

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Wira Malensang
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21043094
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
 Judul : Analisis Sistem Penerimaan Pajak Daerah Di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
 Anggota Penguji 1 : Dr. Ivonne H. Putong, SE.Ak., M.Ak

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.		Koreksi judul analisis sistem penerimaan pajak daerah di BPPRD Kab. Kepulauan Talaud.	
2.		Latar belakang, rumusan masalah, dst disesuaikan dengan judul	
3.		Pembahasan mengenai pengendalian internal atas sistem pengelolaan pajak daerah	
4.		Peneliti terdahulu di tambah 2	
5.		Buat flowchart penerimaan	

Manado, Juli 2025
Ketua Penguji,



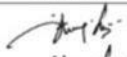
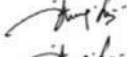
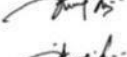
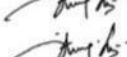
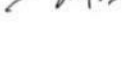
Dr. Ivonne H. Putong, SE.Ak., M.Ak
 NIP. 197206152002122003

Lampiran 8 Lembar Asistensi Penguji 1

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 	
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.I ISSUE: A Issued: 08-08-2011 UPDATE: 1 Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Wira Malensang
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21043097
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
 Judul : Analisis Sistem Penerimaan Pajak Daerah Di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
 Anggota Penguji 1 : Jolly L. R. Turangan, SH., M. Hum

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.		Judul di ubah	
2.		Analisis Sistem Penerimaan Pajak Daerah Di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud	
3.		Permasalahan di sesuaikan	
4.		Latar belakang masalah di sesuaikan	
5.		Tinjauan pustaka di sesuaikan objek penelitian	
6.		Hasil penelitian di sesuaikan	
		Kesimpulan di sesuaikan	
		Dasar hubungan apa	

Manado, Juli 2025
 Penguji 1,


Jolly L. R. Turangan, SH., M. Hum
 NIP. 196807121994031001

Lampiran 9 Lembar Asistensi Penguji 2

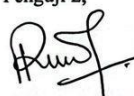
 POLITEKNIK NEGERI MANADO 				
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1 Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Wira Malensang
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21043097
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
 Judul : Analisis Sistem Penerimaan Pajak Daerah Di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
 Anggota Penguji 2 : Dr. Dra. Rolina E. Manggopa, M.Pd

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1		Judul berubah. Latar belakang Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, bab V daftar pustaka disesuaikan.	 17/7/25
2		Baca panduan materi disesuaikan dalam penulisan	
3		penulisan judul dan sub bab	
4		Bab IV banyak keanggean dalam penempatan data	
5		Daftar pustaka	
6		penulisan judul penelitian dan daur ulang disesuaikan	

Manado, Juli 2025
Penguji 2,



Dr. Dra. Rolina E. Manggopa, M.Pd
NIP. 196208011988032003

Lampiran 10 Surat Keterangan Plagiasi



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 040/AK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Wira Malensang
NIM	:	21043094
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Implementasi Simpatda Dalam Pengelolaan Pajak Daerah
Pembimbing Utama	:	Wenny. A Ginting, SE.,MSi
Persentase	:	23%
Tanggal Pengecekan	:	7 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado, 7 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi, M.Ak
NIP. 199609102024061001

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*